



OPEN ACCESS

## Kesiapan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pati dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Melisa Yusrina,<sup>1</sup> Agus Syakroni,<sup>2</sup> Irma Nur Afidah,<sup>3</sup> & M. Sofyan Alnashr<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[melisayusrin@gmail.com](mailto:melisayusrin@gmail.com), <sup>2</sup>[agus@ipmafa.ac.id](mailto:agus@ipmafa.ac.id),  
<sup>3</sup>[irmanurafidah@ipmafa.ac.id](mailto:irmanurafidah@ipmafa.ac.id), <sup>4</sup>[sofyan@ipmafa.ac.id](mailto:sofyan@ipmafa.ac.id)

### ABSTRACT

The "Kurikulum Merdeka" (Independent Curriculum) is a mandate from the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Religious Affairs for organizers of educational institutions, including madrasah. This research aims to find out how the readiness of Madrasah Ibtidaiyah (MI) in Pati Regency in implementing the independent curriculum according to government policy. This research is a field study with a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interview, and documentation and then analyzed using Miles and Huberman interactive analysis. The results showed that MIN 2 Pati and MI Al-Fattah Juwana as madrasahs in Pati Regency that were used as pilot projects were not fully prepared for the implementation of the independent curriculum. Training related to curriculum implementation has been carried out, but at the practical level there are still some obstacles. These obstacles include the lack of intensive training, the lack of teacher motivation to improve, and the low level of innovation in education implementation. Supporting facilities and infrastructure are also not well available in both madrasahs. The Pati Regency Ministry of Religious Affairs always provides encouragement and assistance in implementing the independent curriculum, starting from intensive training, mentoring, and other supporting infrastructure. Although there are still some obstacles, the independent curriculum at the Madrasah Ibtidaiyah level must be carried out as well as possible so that educational goals will be achieved.

### Keywords:

Kurikulum Merdeka;  
Madrasah Ibtidaiyah;  
Madrasah Curriculum;  
Curriculum  
Implementation

## ABSTRAK

Kurikulum merdeka merupakan amanat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama bagi penyelenggara lembaga pendidikan, termasuk madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pati dalam melaksanakan kurikulum merdeka sesuai kebijakan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MIN 2 Pati dan MI Al-Fattah Juwana sebagai MI di Kabupaten Pati yang dijadikan pilot project belum sepenuhnya siap dalam implementasi kurikulum merdeka. Pelatihan terkait implementasi kurikulum telah dilakukan, namun pada tataran praktis masih dialami beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya pelatihan secara intensif, minimnya motivasi guru untuk berbenah, dan rendahnya inovasi penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana pendukung juga belum tersedia dengan baik pada kedua MI tersebut. Kementerian Agama Kabupaten Pati selalu memberikan dorongan dan bantuan dalam menerapkan kurikulum merdeka mulai dari pelatihan intensif, pendampingan, hingga sarana prasarana pendukung lainnya. Meskipun masih terdapat beberapa kendala namun kurikulum merdeka pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah harus dijalankan sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan akan tercapai.

## Kata Kunci:

Kurikulum Merdeka;  
Madrasah Ibtidaiyah;  
Kurikulum Madrasah;  
Penerapan  
Kurikulum

---

Contact: [fifinurrokhmah48@gmail.com](mailto:fifinurrokhmah48@gmail.com)

© 2023: Semua hak dilindungi undang-undang. Penulis setuju bahwa artikel ini tetap akses terbuka secara permanen di bawah ketentuan *Research Journal on Teacher Professional Development*.

**Article History:** Received 22 October 2023, Revised 23 October, Accepted 28 22 October 2023.

## A. Pendahuluan

Perubahan kurikulum merupakan hal yang tidak terhindarkan karena pendidikan harus merespon perkembangan kehidupan, baik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan budaya, serta perkembangan politik (Ritonga, 2018). Perubahan kurikulum dilaksanakan atas dasar analisa masalah dan evaluasi bersama lembaga pendidikan yang ada di Indonesia (Alnashr & Nuraini, 2022). Hal ini membuat pendidikan harus selalu bertransformasi menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat (Cahyani & Mudzakkir, 2017). Guru dalam menghadapi perubahan kurikulum dituntut profesional dalam memajukan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik (W, 2022).

Kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan pada pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari perubahan dan perkembangan kehidupan. Transformasi pendidikan nampak sangat cepat ketika Covid-19 melanda Indonesia, salah satunya penerapan pembelajaran jarak jauh (Yuliani et al., 2020). Pembelajaran jarak jauh ditetapkan pemerintah untuk menekan laju penyebaran angka Covid-19 (Sadikin & Hamidah, 2020). Dampak dari pandemi Covid-19 ialah kehilangan pembelajaran (*learning loss*) literasi dan numerasi yang signifikan serta kesehatan mental masyarakat (Rahmayanthi et al., 2021). *Learning loss* adalah hilang atau menurunnya pengetahuan dan kemampuan peserta didik baik secara spesifik atau umum (Syah, 2020).

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menerapkan dua opsi kurikulum yang bisa

digunakan sekolah dalam proses belajar mengajar, yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat (kurikulum 2013 yang disederhanakan). Kurikulum darurat digunakan supaya proses belajar mengajar di masa pandemi dapat terfokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar dengan fokus pada materi esensial. Proses pembelajaran dengan berbagai pilihan kurikulum supaya guru tidak hanya mengejar materi kemudian melupakan kemampuan pemahaman siswa (Beatty et al., 2021).

Pemerintah pada tahun 2021 memperkenalkan kurikulum merdeka sebagai opsi tambahan bagi sekolah untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Selama kurun waktu 2022 sampai 2024 semua sekolah/madrasah diberikan tiga opsi menerapkan kurikulum dalam pembelajaran, yaitu: kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Perencanaan dan penerapan kurikulum baru diharapkan mampu mengembalikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dengan tetap mengembangkan potensi peserta didik yang siap menghadapi tantangan masa depan (Suryadien et al., 2022).

Pelaksanaan kurikulum ini akan dilaksanakan dalam program baru pemerintah yaitu program sekolah penggerak, yakni suatu program penyempurna transformasi sekolah sebelumnya sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi tersebut yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Rencananya tahun 2024 pemerintah akan menetapkan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap pemulihan pembelajaran di masa pandemi.

Kurikulum merdeka memiliki beberapa kekhasan yakni lebih mendalam dan sederhana karena hanya fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai kebutuhannya (Suryadien et al., 2022). Kemudian tenaga pendidik dan peserta didik lebih merdeka karena bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi pendidik, mereka akan mengajar sesuai tahapan pencapaian dan perkembangan peserta didik. Selain itu sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik (Fitriyah & Wardani, 2022).

Satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum merdeka diberikan keleluasaan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Hal ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk mengawal pemulihan pendidikan yang ada di Indonesia sebagai dampak dari adanya Covid-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan kemudahan serta menjamin pelaksanaan pendidikan yang bermutu bagi tiap warga Indonesia. Sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan tanpa kebijakan yang sifatnya diskriminatif kepada peserta didik.

Pada tahun 2022, Kementerian Agama Kabupaten Pati menunjuk MIN 1 Pati, MIN 2 Pati, MI Al Fattah, dan MI Alam Alfa Kids sebagai *pilot project* kurikulum merdeka. Lembaga pendidikan tersebut sudah memperoleh beberapa kali pelatihan terkait kurikulum merdeka, baik secara mandiri maupun pelatihan langsung dari Balai Diklat Keagamaan Semarang di Wilayah Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Pati. Hal ini menunjukkan bahwa keempat madrasah sudah dibekali wawasan dan kompetensi

yang cukup dalam menyelenggarakan kurikulum merdeka. Akan tetapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah perlu diteliti lebih mendalam. Hal ini berpijak dari penelitian terdahulu yang menyebutkan berbagai kendala seperti sarana prasarana, penguasaan teknologi, inovasi pembelajaran, dan dukungan berbagai pihak. Guru masih melakukan proses adaptasi terhadap pembuatan modul ajar, proses pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, serta penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Rahmatan Lil Alamiin*.

## **B. Kerangka Teori**

### **Konsep Dasar Kurikulum Merdeka**

Di lihat dari sejarahnya, kata kurikulum adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *curriculum*. Pada masa itu istilah kurikulum digunakan untuk menunjukkan tahapan yang harus dilalui oleh seorang pelari dalam perlombaan lari estafet yang dikenal dalam dunia atletik. Semakin berkembangnya zaman, istilah itu kemudian mengalami perkembangan sehingga meluas dan merambah sampai ke dunia pendidikan (Sanjaya, 2015). Di Indonesia istilah kurikulum baru populer sejak tahun lima puluhan, sebelumnya yang lazim digunakan adalah rencana pelajaran.

Kurikulum dipergunakan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan mengembangkan potensi peserta didik, berakhlak mulia, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang, 2003). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan (Mulyasa, 2013). Dengan demikian kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat materi dan pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya dan memiliki akhlak mulia.

Kurikulum itu bersifat dinamis artinya dapat menyesuaikan perkembangan dan tantangan zaman. Kurikulum di Indonesia dimulai pada tahun 1947 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Kurikulum di suatu negara bisa berubah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dinamika kehidupan masyarakat lokal dan global yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ruminiati, 2016).

Perubahan dan pengembangan kurikulum juga terjadi pada akhir tahun 2019 yang berlangsung hingga 2022 dikarenakan wabah Covid 19 yang menimpa seluruh dunia, termasuk Indonesia (Dewi, 2020). Pemerintah tidak hanya merubah proses pembelajaran ketika pandemi berlangsung, tetapi juga merubah tatanan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Di tahun 2021 hingga 2022 Kemendikbudristek memberlakukan tiga penggunaan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka (Fitriyah & Wardani, 2022).

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, pandemi Covid 19 memiliki dampak kehilangan pembelajaran (*learning loss*) literasi dan numerasi secara signifikan. *Learning loss* merupakan hilangnya kesempatan belajar karena kurangnya intensitas interaksi dengan pendidik saat proses pembelajaran sehingga mengakibatkan penurunan penguasaan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik (Rahmat et al., 2021). Dengan latar belakang itulah Kemendikbudristek

menyusun kurikulum merdeka sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran pasca pandemi.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi (Tim-Penyusun, 2022). Kurikulum Merdeka pertama diluncurkan pada tahun 2022 dan bersifat opsional. Artinya, sekolah bisa memilih untuk mengadopsi Kurikulum Merdeka, atau tetap pada Kurikulum 2013. Latar belakang dari Kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka juga mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.

Implementasi kurikulum merdeka menekankan pada perkembangan karakter, kompetensi peserta didik, serta lebih fleksibel, dan berfokus pada materi esensial dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan yaitu berbasis proyek dalam mengembangkan kemampuan *soft skill* dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila (Inayati, 2022). Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, pembelajaran yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar (Dewi Rahmadayanti, 2022).

### C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati dengan objek penelitian MI yang menerapkan kurikulum merdeka yakni MIN 2 Pati dan MI Al-Fattah Juwana. Kedua MI dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan tujuan menentukan informan kunci yang sesuai dengan fokus penelitian supaya mendapatkan hasil yang akurat (Bungin, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggali permasalahan terkait implementasi kurikulum merdeka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### a. Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pati

Di Kabupaten Pati, MI yang menjadi *piloting* kurikulum merdeka yaitu MIN 1 Pati, MIN 2 Pati, MI Al Fattah, dan MI Alam Alfa Kids. Keempat madrasah sudah melaksanakan kurikulum merdeka sejak tahun ajaran 2022/2023 tetapi baru kelas 1 dan 4. Dalam mengawal pelaksanaan kurikulum merdeka, Kemenag Kabupaten Pati membekali pelatihan 16 tim pengawas. Tugas pengawas yaitu mendampingi madrasah dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Selain itu dalam hal membina, memantau, menilai, dan membimbing serta melatih madrasah binaannya.

Implementasi kurikulum merdeka pada jenjang MI di Kabupaten Pati

sangat ditentukan oleh peran guru dan kepala madrasah. MIN 2 Pati dan MI Al Fattah yang telah menerapkan kurikulum merdeka dipilih menjadi objek penelitian. Kedua MI ini menerapkan kurikulum merdeka pada kelas 1 dan 4 yang sudah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2022-2023. Pihak madrasah merespon dengan baik adanya kurikulum merdeka karena dinilai sangat responsif terhadap perkembangan teknologi. Dampak menurunnya literasi dan numerasi sangat nyata dirasakan di madrasah sehingga perlu adanya pembaharuan suasana belajar yang santai, tanpa tekanan, menyenangkan, dan siswa dapat menemukan sendiri hasil belajarnya. Wujud merdekanya kurikulum ini salah satunya yaitu madrasah diberi kebebasan untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Untuk mengembangkan keterampilan tersebut diperlukan suatu model kurikulum yang dapat memacu pendidik lebih aktif melakukan inovasi pembelajaran.

Penerapan kurikulum merdeka di kedua madrasah tersebut, diawali dengan sosialisasi dan pembekalan kepada guru kelas 1 dan 4. Pembekalan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang kurikulum merdeka dan juga memberdayakan guru dalam pelaksanaannya nanti. Ketika sudah mendapatkan pembekalan, maka guru bersama kepala sekolah dan waka kurikulum merencanakan program. Perencanaan dimaksudkan untuk merancang kegiatan pembelajaran supaya efektif dan efisien sehingga tercapainya tujuan pembelajaran (Ardianti & Amalia, 2022). Dengan adanya perencanaan, guru dapat mempersiapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa.

Guru diberi akses untuk masuk dalam *platform* merdeka mengajar yang digunakan untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Platform ini memberikan fasilitas pelatihan mandiri kepada guru untuk dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas. Tujuannya untuk membantu para pendidik dalam mengembangkan kompetensinya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka (Marisana et al., 2023). Terdapat pula fitur video inspirasi, yang mana guru memperoleh beragam video inspirasi untuk mengembangkan kompetensi pembelajaran kurikulum merdeka. Selanjutnya ada fitur ayo berkarya, dimana guru dapat membuktikan karyanya sehingga bisa menginspirasi guru untuk maju bersama.

Sebelum melakukan peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka, pihak madrasah juga mengadakan pertemuan dengan wali murid. Sebagai madrasah yang mengedepankan karakter dan juga keterampilan siswa dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan *Rahmatan lil alamin*, maka perlunya mengundang orang tua untuk mengenalkan kurikulum merdeka dan bersama-sama mengawal belajar anak ketika di rumah. Sehingga orang tua tidak kaget ketika mendapati anaknya mendapatkan tugas kerajinan tangan. Antara guru dan orang tua bekerja sama dalam mendukung proses belajar anak. Selama pelaksanaan kurikulum ini, orang tua menyambut dengan baik dan tidak ada keluhan terkait pembelajaran anak.

Rencana kerja untuk kurikulum merdeka di MIN 2 dan MI Al Fattah yaitu terkait asesmen. Asesmen ini dilakukan dengan teknik formatif dan sumatif (Nasution, 2022). Asesmen formatif dilakukan oleh guru bersamaan

dengan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan siswa. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan ketika sudah selesai satu lingkup materi pelajaran. Dalam merancang implementasi kurikulum merdeka di madrasah, kepala MIN 2 Pati melibatkan guru kelas, koordinator bidang kurikulum, komite, guru mata pelajaran, dan juga pengawas madrasah.

Selama menjalankan kurikulum merdeka, banyak tantangan yang dihadapi oleh para guru. Tantangan yang paling utama yang dirasakan oleh MIN 2 Pati dan MI Al Fattah yaitu teknologi pembelajaran. Masih ada beberapa guru yang gptek untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital. Sehingga antar guru saling berbagi pengalaman dan memberikan suport untuk demi memajukan pendidikan. Sarana yang dimiliki madrasah pun belum seimbang dengan jumlah kelas yang dimiliki. Misalnya dalam penggunaannya proyektor harus secara bergantian dengan kelas lain. Motivasi guru dalam menyelesaikan tugas PMM (platform merdeka mengajar) harus terus dibangun, karena banyaknya video dan proyek yang harus diselesaikan. Menurut Kepala MI Al Fattah, proyek tersebut selain memiliki sisi positif yaitu membekali guru tentang pembelajaran kurikulum merdeka, tetapi juga sangat menyita waktu dalam menyelesaikan tugas tersebut (Halimi, 2022).

MI Al Fattah belum mendapatkan fasilitas penuh dari Kemenag Pati bagi madrasah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Menyelenggarakan sosialisasi dan pembekalan dilakukan mandiri oleh pihak madrasah. Hal serupa di konfirmasi oleh Siti Aminah, pelaksanaan sosialisasi dan pembekalan guru dilakukan secara pribadi bersama dengan MI lain yang menjadi piloting kurikulum merdeka (Aminah, 2022). Kemenag hanya membantu beberapa persen terkait jumlah anggaran yang dikeluarkan. Selain itu sarana penunjang pembelajaran kurikulum merdeka dipenuhi secara mandiri oleh pihak madrasah. Madrasah selalu diberikan arahan oleh pengawas Kemenag untuk memanfaatkan workshop kurikulum merdeka, sehingga guru madrasah bisa mengembangkan keterampilan pembelajaran yang fleksibel.

Implementasi kurikulum merdeka pada jenjang MI di Kabupaten Pati dilaksanakan dengan pengorganisasian pembelajaran terintegrasi intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek. Hal ini sejalan dengan analisis Anas dkk berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka madrasah ibtidaiyah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa yang dapat memudahkan proses pembelajaran tanpa merasa terbebani dalam pelaksanaan pembelajaran di Madrasah. Hal ini dikarenakan proses penerapan Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Mandiri lebih mendalam, menyenangkan dan mandiri (Anas et al., 2023). Madrasah diberi kewenangan untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik dalam menjalankan program pembelajaran dan dilakukan secara kolaboratif.

Kurikulum merdeka dengan berbagai tantangan yang dihadapi harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang serta kesiapan sumberdaya yang menunjang. Kesiapan MIN 2 Pati dan MI Al-Fattah Juwana menjadi landasan awal untuk senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan. Madrasah dapat melihat dari

tiga aspek utama yakni perencanaan, proses pelaksanaan, dan penilaian(Masnun, 2023) untuk mengukur sejauh mana madrasah telah melaksanakan kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka pada jenjang MI dapat memperbaiki kerugian belajar akibat pandemi Covid 19. Maka guru perlu diberikan peningkatan wawasan dan keterampilan dalam implementasi kurikulum merdeka secara menyeluruh.

Pelaksanaan kurikulum merdeka pada MIN 2 Pati dan MI Al-Fattah yang berbasis pada proyek selaras dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila serta profil pelajar *Rahmatan lil Alamin*. Untuk membentuk karakter dari kedua profil tersebut maka landasan pendidikan harus berbasis pada kebhinekaan dan ajaran agama termasuk nilai pesantren(Hasnawati & Nadliroh, 2023). Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia memang tidak bisa meninggalkan nilai khas yang dimiliki oleh bangsa serta nilai kearifan agama dan budaya.

Pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum merdeka yang diterapkan di MIN 2 Pati dan MI Al-Fattah tidak hanya fokus pada ranah kognitif tetapi juga pembentukan karakter dan peningkatan keterampilan. Profil pelajar yang diharapkan ialah pelajar dengan karakter khas Indonesia yang berbasis pada ajaran agama dan kearifan lokal namun juga adaptif dengan perubahan. Hal ini juga sangat relevan dengan pembelajaran abad-21 yang membekali peserta didik dengan keterampilan 4C yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman(Inayati, 2022).

Peran guru dalam implementasi kurikulum merdeka pada MI di Kabupaten Pati merupakan komponen penting. Guru adalah ujung tombak pembelajaran, pelaksana langsung dalam interaksi dengan siswa, serta penerjemah konsep kurikulum pendidikan. Perhatian besar pemerintah terhadap kurikulum merdeka tidak boleh mengabaikan kompetensi guru. Salah satu kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu kemampuan melaksanakan penilaian autentik sesuai kurikulum merdeka(Rosidah et al., 2021). Jangan sampai guru hanya melakukan penilaian hanya berdasarkan pada rubrik yang ada pada buku tanpa adanya pengembangan dari guru sendiri.

Implementasi kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan oleh MIN 2 Pati dan MI Al-Fattah Juwana harus dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap proses pelaksanaan kurikulum untuk memperoleh fokus utama dalam capaian pendidikan yang diinginkan(Afidah & Jaedun, 2020). Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid terkait program yang dilaksanakan, apa kekurangan dan kelebihan serta bagaimana langkah ke depan. Dengan demikian implementasi kurikulum merdeka akan memperoleh hasil yang maksimal.

Implementasi kurikulum merdeka perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah, satuan pendidikan, maupun masyarakat. Pemerintah tidak bisa memaksakan pelaksanaan kurikulum merdeka tetapi satuan pendidikan belum siap sumber daya manusia dan sarana prasarannya. Belajar dari perubahan kurikulum 2013 dimana masih banyak yang belum siap untuk melaksanakan suatu perubahan kurikulum(Suyanto, 2017). Maka setiap komponen pendidikan harus terus berupaya menjalankan kurikulum merdeka dengan perencanaan matang,

proses yang baik, dan penilaian yang autentik.

**b. Dukungan Pemangku Kebijakan**

Kementerian Agama Kabupaten Pati bertanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Kurikulum merdeka yang merupakan amanat pemerintah pusat harus dilaksanakan sebaik mungkin. Dalam perencanaan program kerja, pengawas melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka. Selama ini pengawas juga telah melaksanakan tugasnya dalam mengawal MI yang menjadi percontohan maupun madrasah yang akan menerapkan kurikulum merdeka. Koordinasi dengan kepala madrasah terus dilakukan supaya target tujuan agar pada tahun ajaran baru 2023 seluruh madrasah harus sudah menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka. Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi Kemenag untuk menerapkan kurikulum merdeka secara serentak pada tahun 2023 karena terdapat 221 MI yang ada di Pati sementara baru ada 4 MI yang menerapkan.

Kenyataan tersebut mengharuskan adanya percepatan dalam program sosialisasi implementasi kurikulum merdeka (IKM). Strategi percepatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan madrasah. Untuk menerapkan kurikulum merdeka seluruh jenjang madrasah ibtdaiyah, Penmad Kemenag Kabupaten Pati melibatkan seluruh anggota dalam menyusun program kerja untuk pelaksanaan kurikulum merdeka nantinya. Diharapkan para pengawas aktif dalam mendampingi dan mengarahkan para guru untuk turut serta mengikuti workshop kurikulum merdeka secara online.

Hal ini dilakukan supaya guru bisa mandiri dalam belajar dan kreatif mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Sebelumnya para pengawas pun dibekali pelatihan guna menjadi fasilitator yang profesional untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka ini (Muhadi, 2022). Selama pelaksanaan kurikulum merdeka ini, para pengawas memberikan pendampingan baik di tingkatan sekolah maupun kecamatan.

Guru yang menjadi peserta sosialisasi dan pembekalan kurikulum merdeka sangat antusias menerapkan kurikulum merdeka. Banyak guru yang merespon positif hadirnya kurikulum merdeka sehingga tumbuh rasa ingin tahu tinggi yang membuat mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya informasi dapat diterima dengan jelas. Pengawas juga memberikan pengarahan kepada guru melalui grup whatapps untuk secara mandiri mengikuti workshop dan mencari informasi tentang kurikulum merdeka. Melalui pelatihan dan kegiatan workshop online, guru diharapkan mempunyai kompetensi yang sesuai untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka di madrasah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenag Kabupaten Pati mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya pelatihan-pelatihan secara langsung sehingga semangat guru dalam belajar dan menyelesaikan tugas di platform merdeka belum maksimal. Platform merdeka mengajar merupakan sebuah aplikasi untuk mempermudah guru dalam kegiatan belajar mengajar sesuai kemampuan murid, yang mana menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Melalui platform ini guru bisa

berinovasi dan dalam menciptakan suasana belajar sesuai dengan tantangan zaman. Tetapi belum semua madrasah bisa menggunakan platform merdeka mengajar, hanya madrasah yang terdaftar secara sah yang bisa mengaksesnya.

Kendala lainnya yaitu terkait anggaran yang sangat minim untuk melaksanakan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka. Hal ini berdampak pada kurang masifnya pelaksanaan sosialisasi tersebut kepada guru-guru madrasah ibtidaiyah. Selain itu belum ada anggaran yang pasti terkait pelaksanaan kurikulum merdeka. Anggaran hanya diperuntukkan bagi yang sudah terdaftar dalam program sekolah penggerak. Anggaran hanya diperuntukkan untuk sosialisasi implementasi kurikulum merdeka, dan itu pun tidak dalam jumlah yang banyak. Fasilitas sarana penunjang bagi madrasah yang telah melaksanakan kurikulum merdeka belum bisa diberikan karena tidak adanya alokasi anggaran dari pusat.

Kementerian Agama Kabupaten Pati memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan proses pendidikan di madrasah yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dalam perspektif manajemen (Sumarsono & Imron, 2017), apa yang dilaksanakan oleh Kemenag Pati dapat dianalisis perannya dalam hal perencanaan, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi ini akan menjamin keberhasilan suatu program apabila dilaksanakan dengan baik, termasuk implementasi kurikulum merdeka di MI.

Perencanaan dalam menyelenggarakan kurikulum merdeka di MI dimulai dengan rapat online bersama para pejabat pada 23 April 2022. Hasil rapat merumuskan untuk segera membentuk tim khusus guna memperbaiki proses pembelajaran dampak dari pandemi. Dalam merumuskan perencanaan pendidikan masa pandemi, Kemenag Kabupaten Pati melibatkan beberapa anggota tim dari divisi Pendidikan Madrasah dengan membentuk *teamwork*. *Teamwork* adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual dengan ciri memiliki tujuan, memahami peran dan tugas, saling percaya dan mendukung serta bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama (Dejanaz, 2006).

Kemenag juga melakukan pembelakalan kepada 16 tim pengawas untuk memberikan pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Pemberdayaan sumber daya manusia sangat diutamakan oleh Kemenag guna membekali guru sehingga bisa profesional dalam melaksanakan kurikulum merdeka. perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka membentuk manajemen yang lebih baik. Tugas tim pengawas selain melakukan bimbingan pelaksanaan kurikulum merdeka, juga mempunyai tugas dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas pendidikan.

Kemenag Pati juga melakukan pengarahan kepada tim pengawas, kepala MI, dan guru pelaksana kurikulum merdeka. Bentuk dari pengarahan ada beberapa macam, diantaranya dengan pemberian perintah serta memberi motivasi kepada anggota untuk dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan (Widiyawati & Adiono, 2020). Pengarahan Kemenag bersifat tindakan

pelaksanaan tugas secara nyata mulai tahun ajaran 2022, kelas 1 dan 4 telah melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka.

Pengarahan yang dilakukan secara *continuous* yaitu dengan melakukan laporan perkembangan pelaksanaan kurikulum merdeka. Laporan ini dibuat oleh setiap madrasah yang melaksanakan kurikulum merdeka yang ditujukan oleh Kemenag Kabupaten Pati. Tetapi dalam pelaksanaan pelaporan masih ada sekolah yang terlambat melaporkan laporannya karena kurangnya kesiapan madrasah yang menjadi *pilot projek*. Sejalan dengan penelitian Arifa bahwa perubahan kurikulum yang kurang matang, tergesa, dan terlalu cepat berganti akan sangat memberatkan madrasah sebagai pelaksana. Terutama bagi sekolah yang masih memerlukan banyak bantuan dan berada di daerah tertinggal.

Pengawas Kemenag bersama kepala madrasah terus melakukan motivasi kepada guru kelas supaya bisa menyelesaikan tugas dari platform merdeka mengajar. Platform merdeka mengajar dibangun untuk menunjang guru dalam penerapann kurikulum merdeka supaya mendapat referensi, inspirasi, serta pemahaman tentang kurikulum merdeka. Di platform merdeka mengajar guru bisa mengakses terkait asesmen murid, perangkat ajar, bukti karya, pelatihan mandiri, video inspirasi dan komunitas(Sari et al., 2022).

Dukungan dari Kementerian Agama Kabupaten Pati terhadap implementasi kurikulum merdeka pada jenjang MI telah dilakukan dengan baik. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan senantiasa dilakukan supaya kurikulum merdeka dapat dilaksanakan sepenuhnya di seluruh madrasah di Kabupaten Pati. Dukungan dari pemerintah tidak akan ada artinya tanpa kerja keras dari madrasah dan guru yang akan menerapkan dalam pembelajaran. Oleh karenanya kerjasama semua pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka pada jenjang MI di Kabupaten Pati.

## **E. Kesimpulan**

Implementasi kurikulum merdeka pada jenjang MI di Kabupaten Pati dilaksanakan secara bertahap MIN 2 Pati dan MI Al Fattah Juwana merupakan dua dari empat MI percontohan. MIN 2 Pati dan MI Al-Fattah Juwana sebagai pilot project belum sepenuhnya siap dalam implementasi kurikulum merdeka. Pelatihan terkait implementasi kurikulum telah dilakukan, namun pada tataran praktis masih dialami beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain kurangnya pelatihan secara intensif, minimnya motivasi guru untuk berbenah, dan rendahnya inovasi penyelenggaraan pendidikan. Sarana dan prasarana pendukung juga belum tersedia dengan baik pada kedua MI tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa kendala namun kurikulum merdeka pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah harus dijalankan sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan akan tercapai.

\*\*\*\*\*

## Referensi

- Af'idah, I. N., & Jaedun, A. (2020). Curriculum evaluation of French learning in senior high school. *Research and Evaluation in Education*, 6(1).  
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/28006-88483-1-PB.pdf
- Alnashr, M. S., & Nuraini, L. (2022). *Computational Thinking dalam Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal*. Mafapress.
- Aminah, S. (2022). *Wawancara*.
- Anas, Ibad, A. Z., Anam, N. K., & Hariwahyuni, F. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah: Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(1). <https://www.scribd.com/document/668913466/99-116-IMPLEMENTASI-KURIKULUM-MERDEKA-MADRASAH-IBTIDAIYAH-MI>
- Ardianti, Y., & Amalia, N. (2022). Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppp.v6i3.55749>
- Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L., Pradhan, M., & Suryadarma, D. (2021). Schooling progress, learning reversal: Indonesia's learning profiles between 2000 and 2014. *International Journal of Educational Development*, 85. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102436>
- Bungin, M. B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-Format Kuantitatif, Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Cahyani, F., & Mudzakkir, M. (2017). Relasi Kuasa dalam Perubahan Kurikulum 2013. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v6i1.18186>
- Dejanaz. (2006). *Interpersonal Skillist in Organization*. MC. Grow.
- Dewi Rahmadayanti, A. H. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Basicedu*, 6(4). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431>
- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55-61. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>
- Fitriyah, C. Z., & Wardani, R. P. (2022). Paradigma Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/j.js.2022.v12.i3.p236-243>
- Halimi, W. A. (2022). *Wawancara*.
- Hasnawati, L., & Nadliroh, A. (2023). Diversity and Pesantren Values as the Basis of Education in Malaysia and Indonesia. *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.35878/guru.v3i1.674>
- Inayati, U. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Abad-21 di SD/MI. *ICIE: International Conference on Islamic Education 2021*. <http://103.35.140.33/index.php/ICIE/article/view/241>
- Marisana, D., Iskandar, S., & Kurniawan, D. T. (2023). Penggunaan Platform Merdeka Mengajar untuk Meningkatkan Kompetensi Guru di Sekolah Dasar. *Basicedu*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4363>
- Masnun, M. (2023). Kesiapan Madrasah Ibtidaiyah dalam Menghadapi Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1327>
- Muhadi, M. (2022). *Wawancara*.
- Mulyasa. (2013). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. In *Bandung: Remaja Rosdakarya*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. W. (2022). Asesment kurikulum merdeka belajar di sekolah dasar. *Prosiding*

- Pendidikan Dasar*, 135-142. <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/ppd.v1i1.181>
- Rahmat, A., Isa, A. H., Ismaniar, & Arbarini, M. (2021). *Model Mitigasi Learning Loss Era Covid 19: Studi pada Pendidikan Nonformal Dampak Pendidikan Jarak Jauh*. Samudra Biru.
- Rahmayanthi, D., Moeliono, M. F., & Kendhawati, L. (2021). Adolescents Mental Health During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 23(1), 91-101. <http://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/psikologi/article/view/1417>
- Ritonga, M. (2018). Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1277649>
- Rosidah, C. T., Pramulia, P., & Susiloningsih, W. (2021). Analisis Kesiapan Guru Mengimplementasikan Asesmen Autentik Dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jpd.v12i01.21159>
- Ruminiati. (2016). *Sosio Antropologi Pendidikan Suatu Kajian Multikultural*. Gunung Samudera.
- Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 06, 02.
- Sanjaya, W. (2015). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Prenada Media.
- Sari, A. S. L., Pramesti, C., Suryanti, & Suliana, R. (2022). Sosialisasi Platform Merdeka Mengajar sebagai Wadah Belajar dan Berkreasi Guru. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/penamas.vol6.no01.a6105>
- Sumarsono, R. B., & Imron, A. (2017). Manajemen Hubungan dan Partisipasi Masyarakat di Sekolah. *Universitas Negeri Malang*.
- Suryadien, D., Dini, R., & Dewi, A. A. (2022). Rencana Implementasi Kurikulum Prototipe Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal PGMI Uniga*, 1(1).
- Suyanto. (2017). A reflection on the implementation of a new curriculum in Indonesia: A crucial problem on school readiness. *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/1.4995218>
- Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314>
- Tim-Penyusun. (2022). *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran* (1st ed.). Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. [https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/Kajian\\_Pemulihan.pdf](https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduhan/Kajian_Pemulihan.pdf)
- Undang-Undang. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- W, S. (2022). Pengembangan Kurikulum: (Sebagai Peran Guru Profesional). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 3752-3760. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2645>
- Widiyawati, A. T., & Adiono, R. (2020). *Manajemen Koleksi*. UB Press.
- Yuliani, M., Simarmata, J., Susanti, S. S., Mahawati, E., Sudra, R. I., Dwiyanto, H., Irawan, E., Ardiana, D. P. Y., Muttaqin, & Yuniwati, I. (2020). *Pembelajaran Daring untuk Pendidikan: Teori dan Penerapan*. Yayasan Kita Menulis.